

MENGUNGKAP PRAKTEK KECURANGAN (*FRAUD*) PADA KORPORASI DAN ORGANISAI PUBLIK MELALUI AUDIT FORENSIK

Muhammad Miqdad

ABSTRACT

Forensic auditing is a part of special audit, in which it used to find fraud of financial transaction that it done by corruption player. Fraud audit combine two audit types; that are forensic audit and investigate audit. In other words the fraud audit is to test all aspect audits what considering internal control in term of internal audit patterns. To detect fraud practice, there some indicators of fraud; 1). *Financial Statement Fraud*, 2). *Aset Misappropriation*, 3). *Corruption*. To prevent of fraud practice can be done some ways; 1). Designing reliability of internal control, 2). Improving corporate (organization) culture through *Good Corporate Governance (GCG)* principles, 3). Effectiveness internal audit functions.

Keywords: Fraud, Forensic auditing, Financial Statement Fraud, Aset Misappropriation, *Corruption*. corporate (organization) culture, *Corporate Governance Govenance (GCG)* principles.

I. LATAR BELAKANG

Praktek untuk melakukan kecurangan (fraud) tidak hanya terjadi di dunia Korporasi (private), justru di lingkungan sektor publik (pemerintahan) praktek fraud lebih menonjol dilakukan. Lebih-lebih ketika sistem pengelolaan pemerintahan bersifat sentralisasi. Sejak reformasi bergulir, tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah (publik) makin kuat. Untuk itu pemerintah pusat menyiapkan berbagai macam perangkat aturan (regulasi), memperkuat struktur kelembagaan di bidang pengawasan keuangan, penanganan korupsi dan langkah-langkah lainnya.

Jenis fraud (kecurangan) yang terjadi di setiap negara ada kemungkinan berbeda, hal ini karena praktik fraud antara lain sangat dipengaruhi oleh kondisi hukum di negara yang bersangkutan. Di negara-negara yang sudah maju, dimana penegakan hukum sudah berjalan dengan baik dan kondisi ekonomi masyarakat secara umum sudah cukup mantap, praktik-praktik fraud lebih sedikit modus operasinya. Berbeda dengan negara berkembang ataupun negara-negara yang dikenal sebagai negara koruptor, praktik fraud yang terjadi lebih banyak modusnya. Praktik ini menghalalkan segala cara, penggunaan wewenang/kekuasaan yang salah serta selalu berlindung di balik membenaran hukum.